

**PENGARUH IMPELEMENTASI PENERAPAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN
DI SATUAN KERJA KEMENTERIAN
KESEHATAN BALAI PELATIHAN
KESEHATAN BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
Opik Hidayat
130810173**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**PENGARUH IMPELEMENTASI PENERAPAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN
DI SATUAN KERJA KEMENTERIAN
KESEHATAN BALAI PELATIHAN
KESEHATAN BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Opik Hidayat
130810173**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/ atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 11 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

Opik Hidayat

130810173

**PENGARUH IMPELEMENTASI PENERAPAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN
DI SATUAN KERJA KEMENTERIAN
KESEHATAN BALAI PELATIHAN
KESEHATAN BATAM**

Oleh
Opik Hidayat
130810173

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 11 Februari 2017

**Handra Tipa, S.PdL, M.Ak
Pembimbing**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa Skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
3. Bapak Handra Tipa, S.PDI, M.Ak. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
5. Almarhum Ayah dan Ibu serta saudaraku tercinta yang telah mendukung penulis baik spirit maupun materi dan selalu mengiringi doa mereka untuk penulis.
6. Seluruh sahabat penulis terutama kawan-kawan S1 Angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan moral untuk terus menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebajikan dan mendapat pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Batam, 11 Februari 2017

Opik Hidayat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empirik penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penyerapan anggaran di Satuan Kerja Balai Pelatihan Kesehatan Batam, untuk melihat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 80 orang dari 80 Pegawai Balai Pelatihan Kesehatan Batam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survei yang diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada para responden. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyerapan anggaran sedangkan pelaksanaan anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji regresi linear berganda yang menunjukkan $Y = 13,218 + 201 X_1 + (-479) X_2 + 534 X_3 + 055 X_4$. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penyerapan anggaran.

Kata Kunci: Penerapan Anggaran berbasis kinerja, Perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pertanggungjawaban anggaran, Evaluasi Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

ABSTRACT

This study aims to find evidence of the empirical application of performance-based budgeting affect the performance accountability of government institutions and absorption in the Unit Training Centres Batam, to see the effect of the application of performance-based budgeting to performance accountability of government agencies In this study, the samples taken were 80 people 80 Employee Training Centres Batam. Data collected through direct observation and survey obtained by means of the distribution of questionnaires to the respondents. This study uses a model of multiple linear regression analysis software SPSS 21. The results showed that the budget planning, budget accountability and evaluation budget positive and significant impact on performance accountability of government agencies while implementing the budget absorption and no significant negative effect on performance accountability of government agencies. It is shown from the results of multiple linear regression tests that show the $Y = 13.218 + 201 + (479) + 534 + 055$. Based on the conclusions of this study, the application of performance-based budgeting positive effect on performance accountability of government agencies and absorption

Keywords: Implementation of Performance-based budgeting, budget planning, budget execution, budget Evaluation Budget Responsibility, Accountability of Government Performance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Perumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.6.2 Manfaat Praktis.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Konsep Teoritis.....	9
2.1.1	Anggaran Berbasis Kinerja	9
2.1.2	Prinsip-prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja.....	14
2.1.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	18
2.1.3.1	Definisi AKIP	18
2.1.3.2	Prinsip-prinsip Pelaksanaan AKIP.....	19
2.1.3.3	Siklus AKIP	20
2.1.4	Anggaran	22
2.1.4.1	Anggaran Sektor Publik.....	24
2.2	Penelitian Terdahulu.....	28
2.3	Kerangka Pemikiran	35
2.4	Hipotesis	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Desain Penelitian	37
3.2	Operasional Variabel.....	40
3.2.1	Penerapan Anggaran berbasis kinerja	40
3.2.2	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	42
3.2.3	penyerapan anggaran	43
3.3	Populasi dan Sampel	43
3.3.1	Populasi	43
3.3.2	Sampel	44
3.4	Teknik Pengumpulan Data	45
3.4.1	Angket atau Kuesioner.....	46

3.4.2	Metode Dokumentasi	47
3.4.3	Wawancara	47
3.5	Metode Analisis Data	48
3.5.1	Analisa Deskriptif.....	49
3.5.2	Uji Kualitas Data	50
3.5.2.1	Uji Validitas.....	50
3.5.2.2	Uji Realibilitas.....	52
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	53
3.5.3.1	Uji Normalitas.....	53
3.5.3.2	Uji Multikolinieritas.....	54
3.5.3.3	Uji Heterokedastisitas	55
3.5.4	Uji Pengaruh	55
3.5.4.1	Regresi Linear Berganda	55
3.5.4.2	Kofisien Determinasi (R^2)	56
3.5.5.1	Pengujian Simultan (Uji T).....	58
3.5.5.2	Pengujian Parsial (Uji F)	59
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	60
3.6.1	Lokasi Penelitian	60
3.6.2	Jadwal Penelitian	60
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Balai Pelatihan Kesehatan Batam.....	61
4.1.1	Visi dan Misi Balai Pelatihan Kesehatan Batam	62
4.1.2	Struktur Organisasi.....	63
4.2	Analisis Data	64

4.2.1	Analisis Deskriptif.....	64
4.2.1.1	Karakteristik Responden	64
4.3	Analisis Data dan Pembahasan	66
4.3.1	Uji Validitas	66
4.3.2	Uji Reliabilitas.....	73
4.4	Hasil Uji Asumsi Klasik	74
4.4.1	Uji Normalitas.....	74
4.4.2	Uji Multikolinieritas... ..	78
4.4.3	Uji Autokorelasi.....	80
4.4.4	Uji Heteroskedesitas	82
4.4.5	Hasil Uji Hipotesis	83
4.4.5.1	Uji Regresi Linear Berganda	83
4.4.5.2	Kofisien Determinasi (R^2)	85
4.4.5.3	Pengujian Simultan (Uji F).....	86
4.4.5.4	Uji Parsial (Uji T)	87
4.5	Pembahasan	89
4.5.1	Hasil Uji Pengaruh Perencanaan Anggaran (X1) Terhadap Akuntabilitas Pemerintah (Y)	89
4.5.2.	Hasil Uji Pengaruh Pelaksanaan Anggaran (X2) Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Y).....	90
4.5.3.	Hasil Uji Pengaruh Evaluasi Kinerja (X3) Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Y)	91
4.5.4.	Hasil Uji Pengaruh Evaluasi Kinerja (X4) Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Y).....	92
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	93

5.2	Saran-saran	94
-----	-------------------	----

DAFTAR PUSTAK	96
----------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran dengan Target dan Realisasi Kinerja Bapelkes Batam.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 <i>Skala Likert</i> Pada Teknik Pengumpulan Data	46
Tabel 3.2 Tabel interpretasi	57
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	60
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	65
Tabel 4.2 Pendidikan Responden.....	65
Tabel 4.3 Lama Bekerja Responden	66
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas X1	67
Tabel 4.5 <i>Corrected Item-Total Correlation</i> X1	67
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas X2	68
Tabel 4.7 <i>Corrected Item-Total Correlation</i> X2	69
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Validitas X3	69
Tabel 4.9 <i>Corrected Item-Total Correlation</i> X3	70
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas X4	71
Tabel 4.11 <i>Corrected Item-Total Correlation</i> X4	70
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Validitas Y1	72
Tabel 4.13 <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Y1	72
Tabel 4.16 Hasil Uji Realibilitas	73
Tabel 4.17 <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	76
Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinearitas	79

Tabel 4.19 Hasil Pengujian Autokorelasi.....	81
Tabel 4.20 Uji Regresi Linear Berganda	84
Tabel 4.21 Koefisien Determinasi (R^2)	86
Tabel 4.22 Hasil Pengujian Simultan (Uji F)	87
Tabel 4.33 Hasil Pengujian Parsial (Uji T).....	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Siklus Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan	21
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1. Struktur Organisasi.....	63
Gambar 4.2. Hasil Pengujian Normalitas.....	77

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1. Rentang Skala	49
Rumus 3.2. <i>Pearson Product Momen</i>	50
Rumus 3.3. Realibilitas Dengan Metode Alpha.....	51
Rumus 3.4. Koefisien Ganda (R)	56
Rumus 3.5. Koefisien Determinasi (R).....	57
Rumus 3.6. Rumus Uji T	58
Rumus 3.7. Rumus Uji F.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem perencanaan dan penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Sistem perencanaan dan penganggaran sektor publik di Indonesia mengalami perubahan dengan di berlakukannya UU nomor 25 tahun 2004 dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional menjabarkan perencanaan nasional dan UU Nomor 17 tahun 2003, menjelaskan tentang perubahan sistem anggaran dari Sistem Anggaran Tradisional (*Tradisional Budget system*) menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*).

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat

digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik).

Penyerapan anggaran menjadi topik menarik akhir-akhir ini. Fenomena APBN dan APBD yang kurang terserap di awal tahun, tapi digenjut penyerapannya di akhir tahun sering terjadi. Pengertian penyerapan anggaran yang sederhana adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya. Misalnya anggaran sebesar Rp100 juta terealisasi sebesar Rp 90 juta, berarti tingkat penyerapan anggaran sebesar 90%. Fenomena yang terjadi, menjelang akhir tahun anggaran, instansi pemerintah berusaha menyerap anggaran mendekati 100%, agar tidak dinilai penyerapan anggarannya rendah.

Balai Pelatihan Kesehatan Batam telah menerapkan anggaran berbasis kinerja pada penyusunan anggaran tahun 2011. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah tersebut.

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah, dimana kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Untuk Balai Pelatihan Kesehatan Batam, berdasarkan data Penyerapan Anggaran Tahun 2011-2015, secara keseluruhan sudah menunjukkan indikasi adanya peningkatan kinerja dan perbaikan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaannya seperti yang diuraikan pada tabel ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2011 - 2015 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran dengan Target dan Realisasi Kinerja Bapelkes Batam Tahun 2011 - 2015

No	TA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pagu	27,911,606,000	16,941,780,000	20,900,224,000	12,719,870,000	19,991,111,000
2	Realisasi Anggaran (Rp.)	14,600,561,099	11,444,172,390	16,575,967,54	11,355,027,949	18.368.441.837
3	Realisasi anggaran (%)	52.31 %	67.55 %	79.31 %	89.27 %	91,88%
4	Alokasi Anggaran Untuk Diklat	4,547,281,000	5,160,190,000	5,124,459,000	2,897,501,000	4,194,670,000
5	Target Kinerja	690	770	1080	305	1085
6	Realisasi Kinerja	840	760	1074	471	1057
7	Realisasi Kinerja (%)	126,09 %	98,7%	99,44 %	154,43 %	97,42
8.	Unit Cost per Output Kinerja	5,413,429	6,789,723	4,771,377	6,151,806	3,902,018

Dalam tabel diatas menunjukkan hal – hal sebagai berikut :

1. Pagu anggaran total Bapelkes Batam dari Tahun 2011 mengalami penurunan pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2011 merupakan tahun berdirinya Bapelkes Batam, dimana anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional Bapelkes Batam baik belanja modal maupun belanja keperluan operasional perkantoran, sedangkan alokasi anggaran khusus diklat mengalami peningkatan,

sehingga berdampak pada peningkatan kinerja. Selain itu, mengenai serapan anggaran pada tahun 2011 sangat rendah tetapi meningkat pada tahun 2012.

2. Pada Tahun 2013 pagu anggaran total meningkat kembali, tetapi alokasi untuk diklat mengalami penurunan yaitu Rp. 5,124,459,000 dengan target kinerja meningkat yaitu dengan output 1.080 orang dan terealisasi 1.074 orang. Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya belanja modal dan anggaran bisa fokus ke dalam pelaksanaan tupoksi atau kinerja..
3. Pada Tahun 2014, pagu anggaran menurun drastis sehingga berdampak drastis pada alokasi anggaran khusus diklat yaitu Rp. 2,897,501,000, sehingga terjadi penurunan target kinerja. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran untuk Kementerian Kesehatan fokus kepada Program Jaminan Kesehatan. Tetapi dari sisi realisasi anggaran mengalami peningkatan.
4. Pada Tahun 2015, pagu anggaran total meningkat kembali dan alokasi anggaran untuk pelatihan mengalami peningkatan yaitu Rp. 3,947,220,000. Hal ini seiring dengan peningkatan target kinerja menjadi 1.085 Orang. Peningkatan target kinerja ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya seharusnya memerlukan anggaran yang lebih besar,

Pengukuran kinerja yang dilakukan merupakan metode *Performance Gap*, yang dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing – masing kegiatan meliputi *input, output, outcome, benefit, dan impact*

yang dilakukan melalui suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Namun, pengukuran indikator *benefit* dan *impact* relatif sulit dilaksanakan.

Dari latar belakang diatas penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA DI SATUAN KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi masalah dengan judul penelitian pengaruh implementasi penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja di satuan kerja kementerian kesehatan balai pelatihan kesehatan batam adalah :

1. Terjadinya perubahan sistem anggaran dari Sistem Anggaran Tradisional (*Tradisional Budget system*) menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance based budgeting*) dimana dalam system anggaran tradisional tidak adanya tolak ukur yang menyebabkan kinerjanya tidak diukur
2. Perencanaan yang kurang maksimal sehingga terjadi fenomena APBN dan APBD yang kurang terserap di awal tahun, tapi digenjot penyerapannya di akhir tahun sering terjadi.
3. Bagaimana pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja

4. Harapan yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah karena dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam hal penulisan skripsi ini agar lebih terarah pada permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka harus ditetapkan batasan-batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan supaya langkah-langkah pemecahan tidak menyimpang dari koridor pembahasan. Maka batasan yang dimaksud adalah Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada instansi Balai Pelatihan Kesehatan Batam serta Penelitian dilakukan untuk tahun Anggaran 2011 - 2015

1.4 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis uraikan didalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
2. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
3. Bagaimanakah pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
4. Bagaimanakah pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
2. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja
3. Untuk mengetahui pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini penulis kelompokkan menjadi 2 poin, yakni secara teoritis dan secara praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Sebagai referensi akademik dan seluruh masyarakat agar dapat belajar dari hasil penelitian ini sehingga bisa membantu dan mengetahui penelitian pengaruh implementasi penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dan penyerapan anggaran

2. Mengembangkan pengetahuan penulis tentang akuntansi sektor publik
(Akuntansi pemerintahan)

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi instansi sebagai bahan masukan dalam proses penerapan anggaran berbasis kinerja
2. Bagi pembaca sebagai suatu bahan kajian bagi rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi yang akan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama.
3. Bagi lembaga peneliti agar dapat digunakan sebagai dokumen perpustakaan untuk studi pembandingan dan pengembangan dimasa depan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Penelitian

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem perencanaan dan penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Sistem perencanaan dan penganggaran sektor publik di Indonesia mengalami perubahan dengan di berlakukannya UU nomor 25 tahun 2004 dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional menjabarkan perencanaan nasional dan UU Nomor 17 tahun 2003, menjelaskan tentang perubahan sistem anggaran dari Sistem Anggaran Tradisional (*Tradisional Budget system*) menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*).

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat

digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik).

Penyerapan anggaran menjadi topik menarik akhir-akhir ini. Fenomena APBN dan APBD yang kurang terserap di awal tahun, tapi digenjut penyerapannya di akhir tahun sering terjadi. Pengertian penyerapan anggaran yang sederhana adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya. Misalnya anggaran sebesar Rp100 juta terealisasi sebesar Rp 90 juta, berarti tingkat penyerapan anggaran sebesar 90%. Fenomena yang terjadi, menjelang akhir tahun anggaran, instansi pemerintah berusaha menyerap anggaran mendekati 100%, agar tidak dinilai penyerapan anggarannya rendah.

Balai Pelatihan Kesehatan Batam telah menerapkan anggaran berbasis kinerja pada penyusunan anggaran tahun 2011. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah tersebut.

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah, dimana kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Untuk Balai Pelatihan Kesehatan Batam, berdasarkan data Penyerapan Anggaran Tahun 2011-2015, secara keseluruhan sudah menunjukkan indikasi adanya peningkatan kinerja dan perbaikan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaannya seperti yang diuraikan pada tabel ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2011 - 2015 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran dengan Target dan Realisasi Kinerja Bapelkes Batam Tahun 2011 - 2015

No	TA	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pagu	27,911,606,000	16,941,780,000	20,900,224,000	12,719,870,000	19,991,111,000
2	Realisasi Anggaran (Rp.)	14,600,561,099	11,444,172,390	16,575,967,54	11,355,027,949	18.368.441.837
3	Realisasi anggaran (%)	52.31 %	67.55 %	79.31 %	89.27 %	91,88%
4	Alokasi Anggaran Untuk Diklat	4,547,281,000	5,160,190,000	5,124,459,000	2,897,501,000	4,194,670,000
5	Target Kinerja	690	770	1080	305	1085
6	Realisasi Kinerja	840	760	1074	471	1057
7	Realisasi Kinerja (%)	126,09 %	98,7%	99,44 %	154,43 %	97,42
8.	Unit Cost per Output Kinerja	5,413,429	6,789,723	4,771,377	6,151,806	3,902,018

Dalam tabel diatas menunjukkan hal – hal sebagai berikut :

5. Pagu anggaran total Bapelkes Batam dari Tahun 2011 mengalami penurunan pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2011 merupakan tahun berdirinya Bapelkes Batam, dimana anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional Bapelkes Batam baik belanja modal maupun belanja keperluan operasional perkantoran, sedangkan alokasi anggaran khusus diklat mengalami peningkatan,

sehingga berdampak pada peningkatan kinerja. Selain itu, mengenai serapan anggaran pada tahun 2011 sangat rendah tetapi meningkat pada tahun 2012.

6. Pada Tahun 2013 pagu anggaran total meningkat kembali, tetapi alokasi untuk diklat mengalami penurunan yaitu Rp. 5,124,459,000 dengan target kinerja meningkat yaitu dengan output 1.080 orang dan terealisasi 1.074 orang. Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya belanja modal dan anggaran bisa fokus ke dalam pelaksanaan tupoksi atau kinerja..
7. Pada Tahun 2014, pagu anggaran menurun drastis sehingga berdampak drastis pada alokasi anggaran khusus diklat yaitu Rp. 2,897,501,000, sehingga terjadi penurunan target kinerja. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran untuk Kementerian Kesehatan fokus kepada Program Jaminan Kesehatan. Tetapi dari sisi realisasi anggaran mengalami peningkatan.
8. Pada Tahun 2015, pagu anggaran total meningkat kembali dan alokasi anggaran untuk pelatihan mengalami peningkatan yaitu Rp. 3,947,220,000. Hal ini seiring dengan peningkatan target kinerja menjadi 1.085 Orang. Peningkatan target kinerja ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya seharusnya memerlukan anggaran yang lebih besar,

Pengukuran kinerja yang dilakukan merupakan metode *Performance Gap*, yang dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing – masing kegiatan meliputi *input, output, outcome, benefit, dan impact*

yang dilakukan melalui suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Namun, pengukuran indikator *benefit* dan *impact* relatif sulit dilaksanakan.

Dari latar belakang diatas penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA DI SATUAN KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi masalah dengan judul penelitian pengaruh implementasi penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja di satuan kerja kementerian kesehatan balai pelatihan kesehatan batam adalah :

5. Terjadinya perubahan sistem anggaran dari Sistem Anggaran Tradisional (*Tradisional Budget system*) menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance based budgeting*) dimana dalam system anggaran tradisional tidak adanya tolak ukur yang menyebabkan kinerjanya tidak diukur
6. Perencanaan yang kurang maksimal sehingga terjadi fenomena APBN dan APBD yang kurang terserap di awal tahun, tapi digenjot penyerapannya di akhir tahun sering terjadi.
7. Bagaimana pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja

8. Harapan yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah karena dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam hal penulisan skripsi ini agar lebih terarah pada permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka harus ditetapkan batasan-batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan supaya langkah-langkah pemecahan tidak menyimpang dari koridor pembahasan. Maka batasan yang dimaksud adalah Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada instansi Balai Pelatihan Kesehatan Batam serta Penelitian dilakukan untuk tahun Anggaran 2011 - 2015

1.4 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis uraikan didalam skripsi ini adalah:

5. Bagaimanakah pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
6. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
7. Bagaimanakah pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
8. Bagaimanakah pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

5. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja
6. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja
7. Untuk mengetahui pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja
8. Untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini penulis kelompokkan menjadi 2 poin, yakni secara teoritis dan secara praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

3. Sebagai referensi akademik dan seluruh masyarakat agar dapat belajar dari hasil penelitian ini sehingga bisa membantu dan mengetahui penelitian pengaruh implementasi penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dan penyerapan anggaran

4. Mengembangkan pengetahuan penulis tentang akuntansi sektor publik (Akuntansi pemerintahan)

1.6.2. Manfaat Praktis

4. Bagi instansi sebagai bahan masukan dalam proses penerapan anggaran berbasis kinerja
5. Bagi pembaca sebagai suatu bahan kajian bagi rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi yang akan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama.
6. Bagi lembaga peneliti agar dapat digunakan sebagai dokumen perpustakaan untuk studi pembandingan dan pengembangan dimasa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1. Anggaran Berbasis Kinerja

Pengertian anggaran berbasis kinerja adalah penggunaan anggaran berdasarkan output yang dihasilkan. Menurut keputusan Menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 anggaran pendapatan belanja daerah (ABPD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja, artinya sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau keluaran (output) dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan (Mariana 2011).

Anggaran berbasis kinerja dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah sejak diterbitkannya PP Nomor 105 tahun 2000 yang dalam pasal 8 dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di

Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

Menurut Mardiasmo (2010) “*Performance budget* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengolahan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik”. Selanjutnya Mardiasmo (2002) menyatakan “pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*)”. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan Sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Pengertian efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional harus dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Dalam penjelasan PP nomor 105 tahun 2000 dinyatakan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap input yang ditetapkan dalam anggaran harus dapat diukur hasilnya dan pengukuran hasil bukan pada besarnya

dana yang telah dihabiskan sebagaimana yang dilaksanakan pada sistem penganggaran tradisional (*line-item & incremental budget*) tetapi pada tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Kepmendagri No.29 tahun 2002 pengertian anggaran berbasis kinerja adalah:

1. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
2. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggaran dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan efektifitas anggaran.

Anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur (indikator) kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Bastian (2011) "*Performance budgeting* (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategi organisasi.

Performance budgeting mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata dan memakai '*output measurement*' sebagai indikator kinerja organisasi". Berdasarkan pengertian anggaran berbasis kinerja menurut Bastian, komponen-komponen visi, misi dan rencana strategi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian

penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja anggaran dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran kinerja, manajemen dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu unit organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan untuk selanjutnya memberikan penghargaan (*reward*) untuk keberhasilan atau hukuman (*punishment*) untuk kegagalan.

Untuk dapat mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara utuh, terlebih dahulu harus mengetahui langkah-langkah dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Langkah-langkah pokok dalam penerapan *performance budgeting* adalah:

1. Pengembangan suatu struktur program atau aktivitas untuk masing-masing badan atau lembaga.
2. Memodifikasi sistem akuntansi sehingga biaya untuk masing-masing program dapat ditetapkan.
3. Mengidentifikasi ukuran kinerja pada tingkat aktivitas atau pelaksanaan.
4. Menghubungkan biaya dengan ukuran kinerja sehingga target biaya dan kinerja dapat ditetapkan.
5. Membangun sistem monitoring sehingga penyimpangan (*variance*) antara target dengan kenyataan sebenarnya dapat diketahui.

Langkah-langkah tersebut mengandung dua aspek penting, yakni pemrograman (*programming*) dan pengukuran kinerja (*performance measurement*). Program merupakan level klasifikasi pekerjaan yang tertinggi yang dilakukan oleh suatu

badan dalam melaksanakan tanggungjawab, yang digunakan untuk menetapkan porsi pekerjaan yang harus dihasilkan untuk mencapai produk akhir yang menentukan keberadaan-keberadaan tersebut. Sedangkan aktivitas merupakan bagian dari total pekerjaan dalam suatu program. Aktivitas merupakan sekelompok operasi pekerjaan atau tugas yang pada umumnya dilaksanakan oleh unit administratif terendah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran program organisasi.

Menurut Mardiasmo (2011) pendekatan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output*.

Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Anggaran berbasis kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian anggaran berbasis kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan efektifitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (*over spending*).

Menurut pendekatan anggaran berbasis kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan *internal cost awareness*, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai standar kinerja.

Sistem anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja

Dalam menyusun ABK perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan ABK, peranan legislatif, siklus perencanaan anggaran negara, struktur APBN, dan penggunaan ASB.

- a. **Transparansi dan akuntabilitas,** anggaran APBN harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup

masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

- b. **Disiplin anggaran**, pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBN/perubahan APBN.
- c. **Keadilan anggaran**, Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.
- d. **Efisiensi dan efektifitas**, anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah

ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

Selain prinsip-prinsip secara umum seperti yang telah diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan perubahan-perubahan kunci tentang penganggaran sebagai berikut:

Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah

a. Pendekatan dengan perspektif jangka menengah

Pendekatan ini memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien.

Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru, dalam penganggaran tahunan. Pada saat yang sama, harus pula dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.

Cara ini juga memberikan peluang untuk melakukan analisis apakah pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada,

termasuk menghentikan program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan baru dapat diakomodasikan.

b. Penerapan penganggaran secara terpadu

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.

c. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja

Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan Kementerian Negara atau Lembaga atau SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

2.1.3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

2.1.3.1 Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program.

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber

daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

2.1.3.2. Prinsip- Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara,

pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

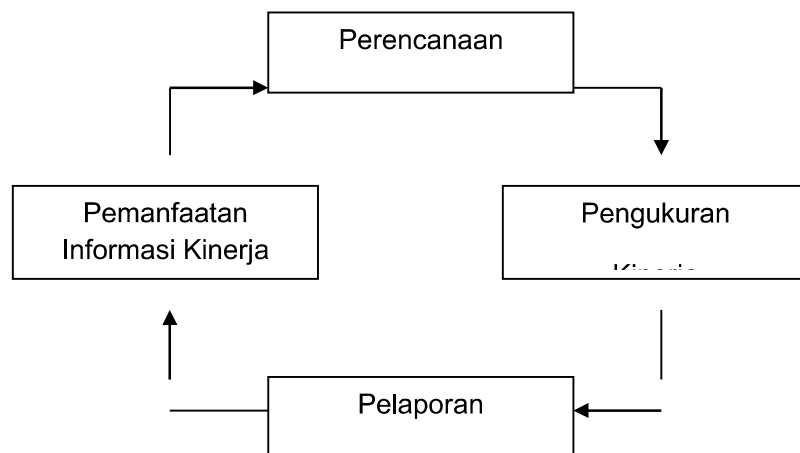
Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.1.3.3. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan strategik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2007

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar diatas, dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun.

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat

dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

2.1.4. Anggaran

Menurut Munawir (2011:47), anggaran merupakan rencana jangka pendek (biasanya satu tahun) perusahaan untuk melaksanakan sebagian rencana jangka panjang yang berisi langkah-langkah strategik untuk mewujudkan strategi objektif tertentu serta taksiran sumber daya yang diperlukan Munawir (2011:47). Penganggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan (Nafarin, 2000). Penganggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

Selain itu Munawir (2011:52) juga berpendapat bahwa dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan perilaku para pelaksana anggaran dengan cara mempertimbangkan, hal-hal berikut ini:

- a. Anggaran harus dibuat serealitas mungkin, secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Anggaran yang dibuat terlalu rendah tidak menggambarkan kedinamisan, sedangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi hanyalah angan-angan

- b. Untuk memotivasi manajer pelaksanaan diperlukan partisipasi *top* manajemen (direksi).
- c. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana tidak merasa tertekan, tetapi termotivasi.
- d. Untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi lebih dini.

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda tentang arti anggaran yang sebenarnya, berikut ini adalah beberapa pendefinisian tentang apa yang dimaksud dengan anggaran. Anggaran merupakan alat perencanaan manajerial dalam bentuk keuangan (Mulyasari dan Sugiri, 2010:439). Anggaran merupakan ungkapan kuantitatif yang normal tentang rencana manajemen (Horngren, 2011: 188). Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2002:61). Sedangkan partisipasi penganggaran memiliki beberapa definisi menurut Brownel dalam Yulia (2011: 582). Anggaran partisipatif adalah suatu proses di mana individu-individu terlibat didalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan target anggaran yang akan dievaluasi. Sementara itu, menurut Kennis (1979) dalam Fazli dan Muslim (2011:12), partisipasi anggaran adalah tingkat keikutsertaan manajer dalam menyusun anggaran.

Anggaran membantu manajer dalam merencanakan kegiatan dan mengawasi kinerja operasi. Penyusunan anggaran secara partisipatif kinerja para manajer akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan

atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasi tujuan atau standar yang ditetapkan, dan karyawan juga memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunannya (Milani dalam Ratnawati Kurnia, 1975). Semakin tinggi tingkat keterlibatan manajer dalam proses penyusunan anggaran, akan semakin meningkatkan kinerja (Indriantoro, 2010).

2.1.4.1. Anggaran Sektor Publik

Menurut *National on Governmental Accounting (NCGA)* yang saat ini telah menjadi *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, definisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2011:164).

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas: Mardiasmo (2012). Mardiasmo juga mengemukakan dalam bukunya *Akuntansi Sektor Publik* (2009) ada 2 jenis anggaran sektor publik yakni :

1. Anggaran Operasional

Anggaran Operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah " Belanja Rutin " . Belanja rutin (*recurrent expenditure*) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.

Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja Administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.

2. Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktifa tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi / modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

Menurut mardiasmo dalam bukunya *Akuntansi Sektor Publik* (2009) tahap penyusunan anggaran sebagai berikut :

1. Tahap persiapan dan penyusunan anggaran

Tahap persiapan dan penyusunan anggaran melibatkan kemampuan analisis perkembangan anggaran atau taksiran atas dasar hasil *output* dan *outcome* yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harus memperhatikan pedoman umum penyusunan Rencana Kinerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan PMK Nomor 104/ PMK.02/2010 tentang Penyusunan Anggaran Rencana Kinerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) yakni :

1. Mengacu pada surat edaran menteri keuangan tentang pagu sementara
2. Mengacu pada rencana kerja pemerintah
3. Mengacu pada rencana kerja kementerian Negara / lembaga
4. Mengacu pada Standar Biaya umum
5. Mencantumkan target kinerja secara spesifik dan terukur
6. Mencantumkan perhitungan prakiraan maju untuk 2 (dua) tahun kedepan
7. Melampirkan dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR) Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan

8. Melampirkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU)

2. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan Anggaran adalah tahap yang dimulai sejak Daftar Isian Pengeluaran Anggaran (DIPA) disahkan pada setiap akhir tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Tahapan pelaksanaan berlangsung selama satu tahun terhitung mulai awal tahun anggaran baru pada bulan Januari setiap tahunnya.

3. Tahap Pelaporan

Tahap ini mencakup antara penyiapan laporan semester pertama dan laporan tahunan termasuk penelaahan atas pelaksanaan untuk waktu satu tahun anggaran yang bersangkutan.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi Kinerja Anggaran, merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran. Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, dan instrumen yang digunakan Anggaran Berbasis Kinerja dapat disimpulkan bahwa secara operasional prinsip utama penerapan Anggaran berbasis kinerja adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam

dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola Kementerian / Lembaga sesuai tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi Kementerian / Lembaga).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar dan pertimbangan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bakri (2015) telah melakukan penelitian dengan judul pengaruh efektivitas pengendalian anggaran terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada dinas pendidikan kabupaten Boalemo, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pengendalian Anggaran (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Y) sebesar 98,28%. Dan secara parsial menunjukkan bahwa perencanaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja sebesar 44%, Umpan Balik (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja (Y) sebesar 24,9%, Interaksi Pengendalian (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran kinerja (Y) sebesar 35,5%. Adapun variabel lain yang tidak diteliti dan ikut mempengaruhi variabel Y adalah sebesar 27,7%
2. Muhammad Firdiansyah Adiwirya dan I Putu Sudana (2015) melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar

penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif secara simultan pada anggaran berbasis kinerja. Secara parsial, transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini, menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang lebih condong pada transparansi dibandingkan dengan akuntabilitas.

3. Taufik kurrohman (2013) melakukan penelitian dengan judul evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di Jawa Timur hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja
4. Herawati (2011) melakukan penelitian dengan judul Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Di Kota Jambi mempunyai pengaruh positif signifikan. Secara parsial yang memiliki pengaruh negatif yaitu variabel variabel X1 (Kejelasan sasaran anggaran) dan X2 (Pengendalian akuntansi), variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel sistem pelaporan (X3).
5. Syambudi Prasetia Bahri (2012) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah Studi Pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari hasil pengujian statistik, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata anggaran berbasis kinerja sebesar 61,13 yang artinya baik dan pelaksanaan akuntabilitas publik sebesar 78,87 yang artinya sangat baik, dalam pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung sebesar 12,20 karena t hitung $>$ t tabel 2,042 maka H_a diterima dan H_o ditolak, hasil koefisien determinasi sebesar 64,1% yang berarti bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik yaitu sebesar 64,1

6. Haspiarti (2012) melakukan dengan judul Pengaruh Penerapan

Anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare) menunjukkan hasil bahwa perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Tahun	Kesimpulan
Bahri	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Anggaran terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada dinas pendidikan kabupaten Boalemo	2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pengendalian Anggaran (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Y) sebesar 98,28%. Dan secara parsial menunjukkan bahwa Perencanaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 44%, Umpan Balik (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja (Y) sebesar 24,9%, Interaksi Pengendalian (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Kinerja (Y) sebesar 35,5%. Adapun variabel lain yang tidak diteliti dan ikut mempengaruhi variabel Y adalah sebesar 27,7%
Muhammad Firdiansyah Adiwirya	Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja		akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif secara simultan pada anggaran berbasis

dan I Putu Sudana	Perangkat Daerah Kota Denpasar	2015	kinerja. Secara parsial, transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini, menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang lebih condong pada transparansi dibandingkan dengan akuntabilitas.
Taufik kurrohman	evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di jawa timur	2013	pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja
Herawati	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi		hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Di Kota Jambi mempunyai pengaruh positif signifikan. Secara parsial yang memiliki pengaruh negatif yaitu variabel variabel X1 (Kejelasan sasaran anggaran) dan X2 (Pengendalian akuntansi),

		(2011)	variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel sistem pelaporan (X3).
Haspiarti	judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare)	2012	menunjukkan hasil bahwa perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam

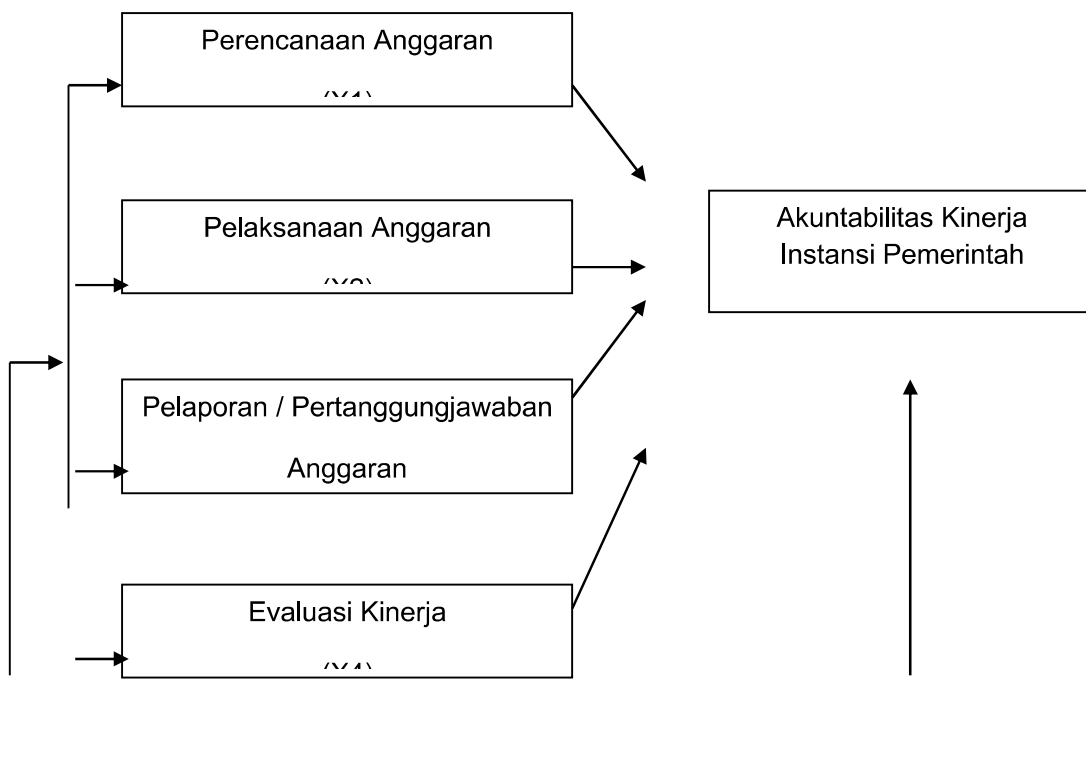
penelitian. Uraian dalam kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian. Kerangka berpikir juga menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada pengunjug mengapa ia mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan dalam hipotesis. Kerangka berpikir dapat disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antar variabel yang diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Visi, misi, sasaran, program dan kegiatan yang merupakan elemen anggaran berbasis kinerja menyebabkan anggaran berbasis kinerja perlu menterjemahkan tujuan kedalam sasaran yang lebih terukur, sasaran kedalam program, dan program kedalam kegiatan dengan output terukur.

Anggaran yang ditetapkan merupakan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah. Maka dari itu, anggaran harus berkualitas dan realistis dan adanya pengendalian yang efektif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah an penyerapan anggaran yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja sehingga akan tercipta

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik dan penyerapan anggaran yang maksimal, bagan kerangka pemikiran dapat lihat dari bagan dibawah ini :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, masalah pokok, dan landasan teori pada bab sebelumnya, maka penulis menetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1= Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H2= Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H3= Pelaporan / pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H4= Evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H5= Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, Pelaporan /pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja berpengaruh secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Menurut Nazir (2011: 84) pengertian dari desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian yang lebih luas desain penelitian mencakup proses-proses sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pemilihan masalah penelitian.
2. Pemilihan kerangka konseptual untuk masalah penelitian serta hubungan-hubungan dengan penelitian sebelumnya.
3. Memformulasikan masalah penelitian termasuk membuat spesifikasi dari tujuan, luas jangkauan dan hipotesis untuk diuji.
4. Membangun penyelidikan atau percobaan.
5. Memilih serta mendefinisi terhadap pengukuran variabel-variabel.
6. Memilih prosedur dan teknik *sampling* yang digunakan.
7. Menyusun alat serta teknik untuk pengumpulan data.
8. Membuat *coding*, serta mengadakan editing dan prosesing data.

9. Menganalisis data serta memilih prosedur statistik untuk mengadakan *generalisasi* serta *inferensistatistic*.
10. Pelaporan hasil penelitian, termasuk proses penelitian, diskusi serta interpretasi data, generalisasi, kekurangan-kekurangan dalam penemuan, serta menganjurkan beberapa saran-saran dan kerja penelitian yang akan datang

Menurut Nazir (2011: 86), desain pelaksanaan penelitian meliputi proses membuat percobaan ataupun pengamatan serta memilih pengukuran-pengukuran variabel, memilih prosedur dan teknik *sampling*, alat-alat untuk mengumpulkan data kemudian membuat *coding*, *editing*, dan memproses data yang dikumpulkan. Dalam pelaksanaan penelitian termasuk juga proses analisis data serta membuat pelaporan. Oleh Schuman desain dalam pelaksanaan penelitian dibagi atas:

- a. Desain sampel,
- b. Desain alat (*instrument*),
- c. Desain administrasi, dan
- d. Desain analisis.

Desain penelitian yang digunakan oleh Kountur (2007:108) menggunakan dua desain penelitian yaitu desain *deskriptif* dan desain korelasi. Desain *deskriptif* adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap proyek yang diteliti. Penelitian *deskriptif* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan kejadian saat itu
2. Menguraikan satu variabel saja

3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment*) terhadap variabel.

Pada umumnya penelitian *deskriptif* menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data melalui survei mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Informasi diperoleh dari sekumpulan orang,
2. Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang tersebut merupakan sampel,
3. Informasi diperoleh melalui bertanya dengan beberapa pernyataan,

Selanjutnya desain penelitian korelasi oleh Kountur (2007:111) yaitu penelitian yang melihat hubungan antara variabel. Penelitian korelasi pada umumnya digunakan apabila maksud penelitian tersebut untuk sebagai berikut:

1. Memahami tingkah laku, apakah itu tingkah laku manusia atau makhluk hidup lainnya, atau bisa saja tingkah laku benda yang merupakan objek penelitian, dapat dilakukan dengan melihat apakah variabel tertentu pada obyek yang akan diteliti berhubungan dengan variabel tertentu lainnya.
2. Membuat prediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi. Apabila ada hubungan antara dua variabel, hal itu berarti jika variabel yang satu diketahui maka dibuat prediksi apa yang akan terjadi pada variabel lain.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka, seperti kata-kata atau kalimat yang tersusun dalam angket, kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan. Data kuantitatif yang diangkakan misalnya terdapat dalam skala pengukuran. Suatu pernyataan/ pertanyaan yang memerlukan alternatif jawaban,

di mana masing-masing : (SS) sangat setuju diberi skor 5, (S) setuju skor 4, (N) netral skor 3, (TS) tidak setuju skor 2 dan (STS) sangat tidak setuju skor 1 (Sugiyono, 2002: 7). Penelitian kuantitatif mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen-instrumen formal, standar dan bersifat mengukur (Sukmadinata,2006: 95)

3.2. Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012:38) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam bagian ini akan dibahas tentang

3.2.1. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan menghubungkan pengeluaran dan hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi input, output dan outcome yang dihasilkan oleh suatu program dan kegiatan. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, Pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja.

Penerapan Anggaran berbasis kinerja diukur berdasarkan Enam variabel sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran (X1.1)

Perencanaan anggaran adalah tahap estimasi pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam renstra organisasi.

2. Implementasi/Pelaksanaan Anggaran (X1.2)

Selama tahap implementasi, pimpinan instansi bertanggungjawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan, dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (*input*) dan *outputnya* dalam sistem akuntansi keuangan.

3. Pertanggungjawaban Anggaran (X1.3)

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara periodik yang mencakup ;

- a. Laporan realisasi anggaran.
- b. Neraca.
- c. Catatan atas laporan keuangan.

4. Evaluasi Kinerja (X1.4)

Evaluasi kinerja dilakukan atas laporan kinerja, pimpinan bisa , melakukan evaluasi sehingga bisa mengetahui dan menganalisis upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, manakala terjadi penyimpangan atau hambatan dalam implementasi anggaran, maka pimpinan bisa mengambil langkah atau kebijakan untuk mengatasi penyimpangan atau hambatan tersebut.

Untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel independen digunakan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian ini dengan menggunakan skala likert, yaitu, skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = netral), skor 2 (TS = tidak setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).

3.2.2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah kuesioner yang dikembangkan dari peneliti – peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan variabel ini. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = netral), skor 2 (TS = tidak setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda atau yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai yaitu berjumlah 100 pegawai.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili).

Teknik Sampling adalah teknik sampel (Sugiyono, 2014 : 81). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, Teknik ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian (Bungin, 2014 : 125)

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bapelkes Batam adalah instansi pemerintah Pusat

2. Anggaran Bapelkes Batam berasal dari Anggaran dan pendapatan belanja nasional (APBN)
3. Penyerapan Anggaran secara berturut turut dari tahun anggaran 2011-2015
4. Bapelkes menyajikan laporan keuangan berupa laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)
5. Jumlah Sampel berjumlah 80 orang yang merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai dalam riset haruslah benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara tergantung pada instrumen yang digunakan dan sumber datanya. Data dari suatu penelitian diperoleh dari bermacam-macam sumber, namun dapat dikelompokkan kedalam dua sumber utama yaitu sumber sekunder dan sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.4.1. Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis: 2008: 66) Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*) dan pertanyaan terbuka (*open question*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi desain interior dari responden.

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis: 2008: 66) Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*) dan pertanyaan terbuka (*open question*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi desain *interior* dari responden.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuisioner dengan skala Likert. Menurut Jogiyanto (2008: 131) *skala likert* digunakan untuk mengukur respon subyek kedalam 5 poin atau 7 poin skala dengan *interval* yang sama. Dengan demikian tipe data yang digunakan adalah tipe *interval*.

Tabel 3.1 .Skala Likert pada teknik pengumpulan data

Skala Likert	Kode	Skor
Sangat setuju	SS	5
Setuju	S	4
Cukup	N	3
Tidak setuju	TS	2
Sangat tidak setuju	STS	1

Sumber : Jogiyanto, 2008:131

3.4.2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, RKAKL, Laporan Pertanggung Jawaban, Laporan Realisasi Anggaran, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya (Arikunto, 2002: 158). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang rencana anggaran serta jumlah realisasi anggaran.

3.4.3.Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik. Metode interview adalah sebuah dialog atau Tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (nara sumber) dilakukan secara berhadap-hadapan (*face to face*).

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara membuat kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokok yang akan ditanyakan, agar dalam proses wawancara dapat terstruktur dengan baik.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data primer umumnya berupa data kualitatif dan digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Data primer yang diperlukan meliputi sejarah perusahaan, keadaan organisasi perusahaan, dan

aktivitas perusahaan. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian menggunakan kuesioner.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui media lain yang bersumber dari buku-buku perpustakaan atau data-data perusahaan.

3.5. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:147) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data dari responden, mentabulasi data dari seluruh responden, menyajikan data yang akan diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

3.5.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa *mean*, *sum*, standar deviasi, *variance*, *range* dan untuk mengukur distribusi data apakah normal atau tidak dengan ukuran *skewness* dan *kurtosis* (Priyatno, 2012: 38). Selain itu analisis deskriptif dapat dilakukan untuk mencari nilai Z (Z score) yang digunakan untuk melihat data yang *outlier*, yaitu data yang menyimpang jauh dari rata-ratanya. Dalam penelitian ini analisis deskriptif menggunakan rentang skala dengan rumus sebagai berikut:

$$Rk = \frac{n(m-1)}{m}$$

Rumus 3.1 Rentang Skala

Keterangan:

n = Jumlah sampel

m = Jumlah alternatif item

Rk= Rentang skala

Berdasarkan rumus tersebut, maka diperoleh jumlah rentang skala sebagai berikut:

$$Rk = \frac{100(5-1)}{5}$$

$$Rk=80$$

3.5.2. Uji Kualitas Data

Data yang diperoleh melalui prosedur pengumpulan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas. Penelitian ini

menggunakan kuesioner sebagai alat pengukuran penelitian, sehingga perlu dilakukan uji validitas dan reabilitas dari kuisisioner yang digunakan.

3.5.2.1. Uji Validitas

Menurut Priyatno (2010: 90) validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuisisioner atau skala, apakah item-item pada kuisisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur.

Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas item. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item lokal (skor total), perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak.

Pada program SPSS teknik pengujian yang sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi *bivariate pearson (produk momen pearson)* Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap. Koefisien korelasi item-total dengan *Bivariate Pearson* dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{[n \sum i^2 - (\sum i)^2] [n \sum x^2 - (\sum x)^2]}}$$

Rumus 3.2 *Pearson Product Moment*

Keterangan :

r_{ix} = Koefisien korelasi item-total (*bivariate pearson*)

i = Skor item

x = skor total

n = Banyaknya subjek

Untuk mengetahui nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db)=n-2 dengan signifikan untuk $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0.05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- b. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0.05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

3.5.2.2. Uji Reliabilitas

Menurut Priyatno (2010: 97-98) uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas, diantaranya metode tes ulang, formula belah dua dari Spearman-Brown, formula Cronbach, formula Flanagan, Cronbach's alpha, metode formula KR-20, KR-21, dan metode Anova Hoyt.

Rumus reliabilitas dengan metode Alpha adalah:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum s_b^2}{s_1^2} \right]$$

Rumus 3.3 Realibilitas dengan metode alpha

Keterangan:

r_{11} = Realibilitas Instrumen

k = Banyaknya Butir Pertanyaan

$\sum s_b^2$ = Jumlah Varian Butir

s_1^2 = Varian Total

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel yang di uji. Apakah nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka jawaban dari responden pada kuesioner sebagai alat pengukuran kurang baik, sebaliknya jika nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah lebih baik.

Analisis reliabilitas adalah analisis untuk menguji sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat diandalkan atau sejauh mana suatu hasil pengukura relatif konsisten jika pengukuran diulang dua kali atau lebih. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Cronbach Alpha.

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya dalam rangka analisis hubungan-hubungan antar variabel, data akan diuji terlebih dahulu. Untuk mengetahui dan memahami uji persyaratan data, pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana melakukan uji dengan dukungan perangkat lunak SPSS yang dilengkapi dengan petunjuk kerja melalui sebuah contoh.

3.5.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki berdistribusi normal atau tidak (Wibowo, 2012:62).Nilai residu yang

berdistribusi yang normal akan membentuk suatu kurva yang kalau digambarkan akan berbentuk lonceng, *bell-shaped curve*.

Menurut Wibowo (2012:62) uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa metode antara lain dengan metode *histogram regression residual*, metode *Normal Probability Plots* dan *Kolmogorov-Smirnov*. Pada metode *Histogram* data yang terdistribusi normal digambarkan dengan kurva yang berbentuk lonceng atau *bell shaped-curve*, sedangkan metode *Normal Probability Plots* jika data menyebar atau berada disekitar garis diagonal atau dan mengikuti arah diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, Sedangkan data menyebar jauh dari garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan untuk *Kolmogorov-Smirnov*, kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan normal jika, nilai *Kolmogorov-Smirnov* $Z < Z_{tabel}$ atau menggunakan nilai *Probability Sig* (2 tailed) $> \alpha$; $\text{sig} > 0,05$.

3.5.3.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam

model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya:

1. Dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) pada model regresi.
2. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2), dan
3. Dengan melihat nilai *Eigenvalue* dan *Condition Index*.

Menurut Santoso dalam Priyatno (2010: 81) pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya dan apabila nilai VIF kurang dari 5, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas.

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Priyatno (2014: 108) Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Macam-macam uji heterokedastisitas antara lain adalah dengan uji koefisien korelasi *spearman's rho*, melihat pola titik-titik pada grafik regresi, uji park, uji glejser. Dalam penelitian ini, peneliti akan menampilkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menampilkan hasil uji koefisien korelasi *spearman's*

rho. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat signifikan lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas.

3.5.4. Uji Pengaruh

3.5.4.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Priyatno (2010:61) mengatakan Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Keterangan:

Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X_1, X_2, \dots, X_n = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y' apabila $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$)

b_1, b_2, \dots, b_n = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e = Error

3.5.4.2. Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Priyatno (2010:65) Analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Nilai R berkisar antara 0 sampai dengan 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Rumus korelasi ganda dengan dua variabel independen adalah:

$$R_{Y.X_1X_2} = \frac{\sqrt{(r_{YX_1})^2 + (r_{YX_2})^2 - 2(r_{YX_1})(r_{YX_2})(r_{X_1X_2})}}{1 - (r_{X_1X_2})^2}$$

rumus 3.4 Korelasi Ganda (R)

Keterangan:

$R_{y, x_1 x_2}$ = Korelasi variabel x_1 dengan x_2 secara bersama-sama dengan harga saham

$r_{y x_1}$ = Korelasi sederhana (*product moment pearson*) antara x_1 dengan Y

$r_{y x_2}$ = Korelasi sederhana (*product moment pearson*) antara x_2 dengan Y

$r_{x_1 x_2}$ = Korelasi sederhana (*product moment pearson*) antara x_1 dengan x_2

Pedoman untuk memberikan nilai hubungan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono dalam Priyatno (2010: 65) sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tabel Interpretasi

Interval	Interpretasi
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara serentak terhadap variabel

dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen (Priyatno, 2010: 66).

Rumus mencari koefisien determinasi dengan dua variabel independent adalah:

$$R^2 = \frac{(r_{YX_1})^2 + (r_{YX_2})^2 - 2(r_{YX_1})(r_{YX_2})(r_{X_1X_2})}{1 - (r_{X_1X_2})^2}$$

Rumus 3.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

r_{YX_1} = Korelasi sederhana (*product moment pearson*) antara X_1 dengan Y

r_{YX_2} = Korelasi sederhana (*product moment pearson*) antara X_2 dengan Y

$r_{X_1X_2}$ = Korelasi sederhana (*product moment pearson*) antara X_1 dengan X_2

3.5.4.3. Uji T

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, Akuntabilitas anggaran, dan penyerapan anggaran. Rumus t hitung pada analisis regresi menurut Priyatno (2010: 68), adalah:

$$t \text{ hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Rumus 3.6 Rumus uji T

Keterangan:

b_i = koefisien regresi variabel i

S_{b_i} = Standar error variabel i

Hasil uji t dapat dilihat pada output *Coefficients* dari hasil analisis *regreslinier* berganda.

3.5.4.4. Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, Akuntabilitas anggaran, dan penyerapan anggaran) berdasarkan hasil Uji F.

Menurut Priyatno (2010: 67) untuk mencari F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Rumus 3.7 Rumus uji F

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data atau kasus

k = jumlah variabel independen

Hasil uji F dapat dilihat pada *output ANOVA* dari hasil analisis regresi linear berganda.

3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Balai Pelatihan Kesehatan Batam Jalan Marina City, kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Kepulauan Riau.

3.6.2. Jadwal Penelitian

Tabel 3.3. Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	2016-2017																			
		Oktober				Nov				Des				Jan				Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penentuan topik																				
2	Penentuan Judul																				
3	Penyusunan Bab I, Bab II, dan Bab III																				
4	Pembagian Kuesioner																				

5	Pengolahan data kuesioner secara keseluruhan dengan menggunakan SPSS																								
6	Pengumpulan Hasil penelitian (Skripsi)																								